

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TERHADAP KINERJA BADAN LEGISLASI DPRD KABUPATEN MOROWALI

Hamzah

(Mahasiswa Profram Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This study aims to analyze the process of policy implementation of Law Number 32 Year 2004 on the performance of Legislation Morowali Regency, informants in the study consisted of the Chairman of Parliament Chairman of Faction Chairperson of the Commission, Member, SKPD. While the data analysis technique used is to reduce the data, presenting data, and describe and conclude and verify the data. The results showed the policy implementation process of the Act No. 32 of 2004 on the performance of Legislation Morowali district legislature has not so it can be a maximum of three indicators to measure in this study such as: first, communication was limited to communication which is run at the level of members of the Board legislation alone without involving stakeholders in the district Morowali. Second, the resources owned by a local parliament member Morowali inadequate. Third, the disposition is a member of Legislation lack of awareness of the responsibilities that have been run in to mandate him. While the factors that affect members of the legislature in carrying out the task is First Area. The total area owned by the District Morowali greatly affect the performance of a member of Legislation Morowali district legislature because most members of the legislative districts are located at a distance away from where they worked as a representative of the people. the lack of creativity and innovation in policy have so that the initiative comes from the Legislation is still so lacking. Should be as representative of the people expected to turn up the initiative of representatives of the legislative initiatives discussed based on the interests of their constituents without having to wait for the draft that is given by the executive.

Keywords: Policy, Implementation, and Perfomance.

Kurang lebih tiga dasarwarsa pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, yang didalamnya terkait dengan peran legislasi DPRD seringkali menjadi sorotan tajam. Kebijakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai *out put* amandemen Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan harapan dapat meningkatkan peran DPRD dalam mengemban amanah rakyat. Amanah rakyat sebagaimana yang diatur dalam konstitusi RI dalam wujud undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur peran dan kewenangan kelembagaan bagi DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Meskipun demikian, ditengah derap langkahnya, Badan Legislasi DPRD kerap kali mengalami stagnasi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam meningkatkan kinerja legislasinya.

Implementsai kebijakan publik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam meningkatkan kinerja Badan Legislasi DPRD kerap terjadi pada tataran koordinatif dan kualitas anggota DPRD itu sendiri. Kedua hal tersebut cukup berkorelasi untuk dapat dijelaskan dalam perspektif implementasi kebijakan publik. Badan Legislasi DPRD dalam memproduksi Peraturan Daerah (Perda) tidak hanya dapat diukur dalam segi kuantitas, tetapi pendekatan kualitatif amat penting. Oleh karena itu, perkembangan implementasi kebijakan publik seringkali mengalami kendala tingkat pemahaman dan kesadaran tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas kedaulatan rakyat. DPRD dalam wujudnya disetiap hari nampak vulgar menampilkan sosoknya melampaui batas-batas rasional dan faktual kepentingan

rakyat. Namun sebaliknya, menampakkan wujud dalam dinamika memperjuangkan kepentingan kelompok, partai dan politik semata.

Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali, sejak terbentuk pada paruh tahun 1999 hingga kini amat diharapkan peran dan kewenangannya terutama tugas dan fungsi legislasi dalam mengatur kehidupan masyarakat (*social order*). Kabupaten Morowali sebagai daerah otonomi baru amat membutuhkan produk legislasi dalam mengatur kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Legislasi dalam wujud Undang-Undang atau Perda dalam konteks kebijakan publik, pada Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali dalam kategori tidak efektif baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak Perda yang kurang efektif berjalan, dan banyak yang mengalami tumpang tindih. Hal ini sesungguhnya terkait dengan kualitas individual Badan Legislasi DPRD dan fungsi koordinasi antar alat kelengkapan DPRD dan pihak eksekutif.

Produk hukum DPRD Kabupaten Morowali, sejak tahun 1999 hingga kurun waktu 2011 ini, dapat di formulasikan, bahwa secara efektif fungsi Badan legislasi DPRD mulai tahun 2001 dalam periode 1999–2004 mampu menghasilkan 104 Perda dan periode 2004–2009 meningkat menjadi 120 Perda, selanjutnya pada periode 2009–2014 hanya mampu memproduksi 49 Perda (pada tahun 2009–2011). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali secara kuantitas dari tahun ke tahun mengalami kecenderungan meningkat. Namun demikian, secara kualitatif mengalami persoalan, karena Perda inisiatif dari DPRD tidak signifikan mengalami perkembangan. Hal ini tentu terkait dengan persoalan kualitas individual anggota dewan dan fungsi koordinatif antar internal alat kelengkapan DPRD dan dinas terkait. Idealnya adalah Badan Legislasi DPRD mestinya menjadi ujung tombak dalam merumuskan dan

melahirkan produk hukum terutama Perda, karena fungsi dan tugas berada pada kewenangan yurisdiksinya.

Fungsi koordinasi antara Badan Legislasi DPRD dan instansi terkait sangat menentukan efektifitas dalam melahirkan Perda. Pihak eksekutif kerap menjadi pengkonsep awal suatu peraturan yang kemudian dilimpahkan ke DPRD dan selanjutnya di bahas di badan legislasi secara bersama. Cerminan ini telah berlangsung lama, dan bahkan telah menjadi tradisi. Hal inilah membuat lembaga legislatif daerah hanya dalam posisi merevisi redaksional konsep (*legal drafting*). Padahal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan tugas dan fungsi cukup dominan dalam pembuatan Perda. Namun dalam kenyataan ini, Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali masih dalam kategori cukup lemah dan tidak efektif dalam menjalankan dan mengimplementasikan kebijakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara efektif.

METODE

Berkaitan dengan, permasalahan dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka metode penelitian ini memakai jenis penelitian deskriptif kualitatif yang sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Dengan demikian, dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data tampak (Sugiyono, 2005:3). Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif suatu realitas atau obyek tidak dapat dilihat secara parsial tetapi dapat dipandang secara holistik (menyeluruh) yang dapat mengakomodasi data-data yang bersifat kualitatif yang dikategorikan berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sejak berdirinya Kabupaten Morowali sebagai Daerah Otonomi Pada Tanggal 12 Tahun 2009, dinamika perkembangan pembangunan mengalami kemajuan yang cukup berarti. Kabupaten hasil pemekaran Poso ini termasuk daerah yang memiliki potensi alam yang berlimpah. Eksplorasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari puluhan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali termasuk kawasan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang memiliki prospek yang cerah. Pertautannya antara Makassar dan kendari memberikan akses perdagangan yang relatif strategis dalam menopang tingkat pertumbuhan ekonomi kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di Kabupaten Morowali akhir-akhir ini cukup aspiratif karena melibatkan berbagai stakeholders dalam merumuskan, merencanakan pemba-ngunan. Memang diakui bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pengimplementasiannya pada tataran aplikatif di lapangan kadang dialami, mengingat letak dan kondisi geografis serta luas kawasan pedesaan yang demikian jauh dan terpencil. Oleh karena itu konsep pembangunan partisipatif amat menentukan perencanaan pembangunan yang lebih matang dan aspiratif berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat.

Peran DPRD Kabupaten Morowali yang bersinergi dengan pemerintahan daerah selama ini memberikan dampak positif yang berimplikasi pada tingkat eskalasi pembangunan di berbagai aspek. Namun demikian, peran masyarakat secara keseluruhan amat menentukan kesi-nambungan pembangunan kini dan esok. Oleh karena itu, mempersatukan persepsi dan tujuan dari berbagai elemen masyarakat sebagai faktor penentu arah dan kemajuan pembangunan di masa datang.

Pembahasan

Proses implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali.

a) Komunikasi

Dalam rangka melakukan pembahasan rancangan kebijakan/perda perlu adanya suatu komunikasi yang baik antara sesama anggota Badan Legislasi agar apa yang di bahas dalam pembuatan kebijakan/perda tidak ada yang di rugikan, apalagi hampir seluruh anggota Badan Legislasi yang ada di DPRD Kabupaten Morowali mewakili masing-masing konstituennya yang mempunyai kepentingan yang beragam. Karena dalam pembuatan kebijakan/perda harus mampu mengakomodir semua kepentingan masyarakat yang diwakilnya dan mengidentifikasi setiap persoalan yang dihadapi setiap masing-masing daerah pemilihannya.

Selain komunikasi yang di jaga antar sesama anggota Baleg yang perlu diperhatikan juga adalah komunikasi dengan eksekutif utamanya dinas yang bersentuhan langsung dengan kebijakan yang akan dibuat agar keinginan dari ekskutif dan DPRD Kabupaten Morowali bisa bersinkronisasi dengan apa yang diinginkan keduanya.

Jika tidak ada koordinasi dalam bentuk komunikasi antara anggota Badan Legislasi dengan Pemerintah Kabupaten Morowali maka akan terjadi keterlambatan pembangunan karena masing-masing instansi melakukan apa yang menjadi keinginan instansi atau lembaga tersebut tanpa ada kerjasama dan pemahaman yang sama dalam membuat dan menetapkan suatu kebijakan/perda.

Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komu-nikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui

mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b) Sumber Daya

Sumber Daya adalah kemampuan implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan baik itu Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya yang terkait dengan pelaksanaan Implementasi kebijakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan implementor harus dibekali dengan kemampuan, agar apa yang ingin di-implementorkan mampu diterjemahkan dan mampu dilaksanakan dengan baik. Karena kecenderungan kebijakan tidak maksimal karena Sumber Daya manusia dan Sumber Daya pendukung lainnya yang tidak dimiliki oleh implementor.

Sumber Daya Manusia bisa dilihat dari tingkat pendidikan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali baik itu anggota DPRD sendiri maupun Staf yang ada di kantor DPRD Kabupaten Morowali. Keduanya saling terkait untuk bekerjasama dalam membuat suatu kebijakan sehingga mampu meng-identifikasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kemudian sebagai staf di DPRD mampu mengetahui dan menyediakan materi dalam pembuatan kebijakan/perda yang dibutuhkan. Untuk itu berikut adalah tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Morowali yang ada di Badan Legislasi:

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Anggota Badan Legislasi
DPRD Morowali

No	Pendidikan	Jumlah
1	Master (S2)	-
2	Pendidikan Sarjana lengkap (S1)	11
3	Pendidikan DIII	-
4	Pendidikan SLTA	1
	Jumlah	12

Sumber: diolah dari data sekunder 2012

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jenjang pendidikan anggota DPRD Kabupaten Morowali khususnya anggota yang berada di Badan Legislasi 90% sarjana Strata satu (S1). Ini menandakan bahwa dari kapasitas Sumber Daya Manusia dari jenjang pendidikan sudah memenuhi standar, namun spesifikasi keilmuan yang beragam dapat menimbulkan keberagaman perspektif di dalam membahas persoalan yang kemudian akan di rumuskan oleh badan legislasi sebagai suatu kebijakan/perda yang akan ditetapkan.

Untuk mendukung kelancaran tugas-tugas dan Fungsi Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali bukan hanya anggota badan legislasi saja yang dituntut untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia dari jenjang pendidikan, akan tetapi staf pendukung juga di harapkan mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi agar mampu menerjemahkan apa yang menjadi keinginan para anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali sehingga kinerja kedua elemen tersebut bersinergi dan dapat efektif dalam membuat kebijakan/perda. Dalam hal itu Berikut adalah tabel tingkat pendidikan Staf yang ada di Kantor DPRD Kabupaten Morowali:

Tabel 5.
Tingkat Pendidikan Staf kantor DPRD
Morowali

No	Pendidikan	Jumlah
1	Master (S2)	2
2	Pendidikan Sarjana lengkap (S1)	10
3	Pendidikan DIII	2
4	Pendidikan SLTA	33

Sumber: diolah dari data sekunder 2012

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kondisi tingkat pendidikan staf yang ada di kantor DPRD Kabupaten Morowali masih didominasi dengan tingkat Pendidikan SLTA, yang seharusnya pendidikan staf harus Strata satu hanya berjumlah 10 orang sedangkan master sebanyak 2 orang. Hal ini dapat diketahui bahwa kualitas Sumber Daya Manusia Staf DPRD Kabupaten Morowali dari tingkat pendidikan masih begitu rendah.

c) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implemetor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implemetor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi efektif. Komitmen untuk menjalankan tugas dan fungsi anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali sangat dibutuhkan karena ujung tombak pembangunan suatu daerah berada pada Badan Legislasi DPRD. Sebab *pertama*: apa yang ingin dilaksanakan oleh eksekutif di lapangan tergantung apa yang telah disepakati dan dibahas di Badan Legislasi. *Kedua* produk legislasi merupakan aturan yang mengikat setiap eksekutif dalam bertindak sehingga ada norma-norma yang harus dipatuhi agar tidak terjadi penyimpangan dalam melakukan tugasnya.

Komitmen yang dimaksud disini adalah bagaimana anggota Badan Legislasi mempunyai loyalitas terhadap jabatannya sebagai orang yang membahas setiap kebijakan/perda, apakah mereka selalu hadir dan tepat waktu ketika dilakukan pembahasan-pembahasan terkait masalah legislasi di Kantor DPRD Kabupaten Morowali.

Disposisi selanjutnya adalah sikap demokratis didalam melakukan rapat-rapat membahas masalah kebijakan/perda. Sikap demokratis adalah memberikan ruang setiap anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali mengemukakan pendapatnya sebelum legislasi itu ditetapkan. Selain itu eksekutif juga diberikan kesempatan untuk memberikan pandangannya atau masukan sarannya dalam pembahasan legislasi.

Dengan berbagai corak masyarakat yang diwakili dan berbagai latar belakang partai politik anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali tentunya berbagai kepentingan juga yang muncul sehingga dalam setiap rapat pembahasan legislasi jarang sekali tidak terjadi perdebatan yang panjang, sehingga ketua tidak boleh otoriter mengambil keputusan, akan tetapi memberikan ruang kepada setiap anggota Badan Legislasi untuk mengemukakan pendapat dan pan-dangannya sehingga semua kepentingan terakomodir. Apalagi sistem yang kita anut sekarang adalah sistem demokratis dimana sistem ini memberikan ruang kepada seluruh orang untuk memberikan pendapat dan sarannya sepanjang pandangan dan saran itu sifatnya membangun demi untuk kemajuan Daerah Kabupaten Morowali.

Sebagai Daerah yang terbilang masih begitu muda Kabupaten Morowali belum maksimal melaksanakan ketiga (3) indikator dalam implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja, anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali masih butuh penyesuaian dengan kondisi yang dihadapi, selain itu dinamika politik juga masih

sangat berpengaruh dengan adanya pemindahan Ibu Kota Kabupaten sehingga Kinerja Anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali belum maksimal.

d) Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.

Didalam birokrasi terdapat dua karakteristik utama yakni: "*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi". "*Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas".

SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi". "Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini".

Sifat selanjutnya dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang

berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Morowali terdiri dari beberapa unsur pelaksana dalam hal pembuatan dan pembahasan rancangan Legislasi/Perda, yakni Anggota Dewan sendiri, kemudian dibantu dengan birokrasi yang bertugas memberikan layanan kepada wakil rakyat dalam setiap melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Tentu dibutuhkan hubungan kerjasama yang baik di dalam setiap bekerja, utamanya dalam pembuatan legislasi/perda, namun hubungan kerjasama yang baik akan terbangun jika mereka saling melakukan koordinasi satu sama lain.

Dalam implementasi kebijakan baik-buruknya suatu kebijakan sangat di tentukan struktur Organisasi yang terdapat dalam sebuah Organisasi. Hubungan yang harmonis dan baik setiap unsur dalam organisasi akan menghasilkan kinerja yang berkualitas. Dalam konteks Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali semua bidang dan unsur di Kantor tersebut melakukan hubungan koordinasi dengan baik sehingga memberikan kesan adanya kerjasama yang baik antara pegawai dengan wakil rakyat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Morowali.

Kinerja kerja merupakan ukuran maksimal dalam pengukuran tingkat kepuasan dalam menjalankan fungsi dan tugas legislasi DPRD.

Selain melihat indikator pengukuran implementasi kinerja juga dapat dilihat dari beberapa indikator, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya mengukur tiga (3) indikator yakni *Produktivitas, Responsibilitas dan akuntabilitas/keterbukaan*, karena hanya Ketiga Indikator itulah yang relevan untuk mengetahui sejauh mana kinerja anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali. Berikut Penjelasan:

a) Produktivitas

Produktifitas adalah kemampuan suatu organisasi untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa untuk menunjukkan produktivitas kerja organisasi yang bersangkutan. Dibentuknya Badan Legislasi di DPRD Kabupaten Morowali tentunya diharapkan untuk menghasilkan produk-produk legislasi yang berkualitas dan tingkat legislasi yang di hasilkan itu juga diharapkan meningkat dari tahun-ketahun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena kebutuhan masyarakat semakin hari begitu kompleks sehingga membutuhkan produk legislasi yang kompleks pula.

Ketidakhadiran anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali bisa mengurangi produktivitas anggota Baleg karena agenda legislasi yang seharusnya dibahas mengalami ketertundaan, yang semestinya sudah di setuju dan di tetapkan terpaksa dicarikan waktu untuk membahasnya kembali. Kebanyakan legislasi yang di bahas juga merupakan hasil dari yang di serahkan eksekutif sehingga produktivitas kebijakan/perda inisiatif dari anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali masih begitu kurang. Bahkan dari tahun ketahun semenjak dilantiknya anggota DPRD Kab. Morowali belum begitu produktif, berikut jumlah perda yang di hasilkan anggota Badan Legislatif dari tahun ketahun:

Tabel: 6
Jumlah Perda yang dihasilkan dari tahun
2009-2012

No.	Tahun	Jumlah Perda yang di hasilkan
1.	2009	15 Perda
2.	2010	22 Perda
3.	2011	10 Perda
4.	2012	2 Perda

Sumber Data Sekunder yang sudah di Olah.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa prduktivitas Badan Legislasi DPRD

Kabupaten Morowali dalam Pembuatan Perda dari tahun ke tahun masih rendah. Terlihat pada tahun 2011 Perda yang dihasilkan menurun sampai 50% dari tahun sebelumnya, bahkan di tahun 2012 yang sudah masuk pertengahan tahun baru menghasilkan dua buah Perda. Hal ini menandakan bahwa produktivitas anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali dari tahun ke tahun masih begitu lemah.

Pada dasarnya produktivitas Anggota DPRD khususnya Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali tidak bisa hanya di lihat dari jumlah legislasi yang di hasilkan, namun mestinya harus ada keseimbangan antara turun kelapangan dengan melihat kondisi realitas yang di hadapi konstituennya masing-masing kemudian di perjuangkan melalui Legislasi/ perda yang menyangkut penyelesaian persoalan di lapangan, jangan sampai hanya sebatas melihat atau turun langsung ke konstituennya tanpa ada solusi yang di berikan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi konstituen di lapangan.

b) Responsibilitas

Responsibilitas adalah tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang menyangkut kesesuaian dengan prinsip-prinsip dan kebijaksanaan suatu organisasi. Tanggung jawab anggota DPRD adalah melakukan fungsi *legislasi, budgeting, dan controlling* tidak terkecuali Anggota DPRD Kabupaten Morowali. Untuk melihat sejauh mana fungsi legislasi dilakukan tentu harus melihat seberapa besar anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowlai melaksanakan tanggung jawabnya. Sebagai wakil rakyat yang diberikan mandat oleh masyarakat Kabupaten Morowali harus bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas karena ketika tanggungjawab sudah tidak dijalankan maka kepercayaan masyarakat akan mulai pudar.

Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab yang dimiliki anggota DPRD Kabupaten Morowali sangat mempengaruhi

kinerja dalam membuat suatu legislasi/perda, apalagi tingkat pemahaman yang ada pada masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Morowali terhadap tugas dan fungsinya duduk sebagai wakil rakyat kurang maka tanggungjawab yang di bebankan kepadanya sebagai wakil rakyat akan terabaikan.

Pentingnya rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang wakil rakyat khususnya Anggota DPRD Kabupaten Morowali akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah Kabupaten Morowali dan seandainya wakil rakyat yang ada di Kabupaten Morowali sadar akan hak dan tanggung jawabnya pastilah akan mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat namun sebaliknya apabila rasa tanggung jawab dimiliki akan berakibat fatal terhadap karir politik sang wakil rakyat yang berujung kepada mosi tidak percaya masyarakat terhadap lembaga wakil rakyat yang ada di daerah khususnya Daerah Kabupaten Morowali kedepan.

c) Akuntabilitas/keterbukaan

Akuntabilitas adalah kemampuan suatu organisasi mengimplementasikan kebijaksanaan dan kegiatannya secara konsisten dengan kehendak masyarakat. Indonesia menganut sistem demokrasi maka adalah suatu konsekuensi untuk menerapkan konsep tersebut. Penerapannya mulai dari pusat sampai di daerah harus diterapkan sistem demokrasi, salah satu indikator demokrasi adalah akuntabilitas atau keterbukaan. Akuntabilitas/keterbukaan di laksanakan di setiap lini, tidak terkecuali di DPRD khususnya di Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali. Segala bentuk legislasi yang menyangkut kepentingan umum harus ada keterbukaan termasuk bagaimana memberikan pemahaman dalam bentuk proses formulasi, penetapan, implementasi serta hasil evaluasi legislasi yang ada di Kabupaten Morowali.

Akuntabilitas/keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik itu penyelenggaraan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah karena itu merupakan salah satu pertanggungjawaban kepublik terkait apa yang di lakukan pemerintah tidak terkecuali lembaga DPRD khususnya DPRD Morowali apa yang dilakukan harus terbuka supaya publik Morowali tau apa yang di lakukan karena DPRD merupakan lembaga publik karena yang duduk sebagai pejabat anggota DPRD Kabupaten Morowali merupakan hasil pemilihan yang mendapat amanah untuk duduk sebagai wakil rakyat, sehingga apapun bentuk aktivitasnya terkait masalah pembangunan daerah masyarakat morowali harus mengetahui sebagai konstituen yang diwakili.

Perlunya keterbukaan terhadap Legislasi/ perda yang di bahas DPRD khususnya DPRD Kabupaten Morowali, agar publik/masyarakat mengetahui apa yang di lakukan wakilnya yang duduk sebagai wakil rakyat di DPRD sehingga akuntabilitas kegiatan anggota DPRD dapat di pertanggung jawabkan dengan baik. Karena bagaimanapun anggota DPRD di pilih oleh rakyat untuk mengakomodir kepentingan rakyat jangan sampai para Anggota DPRD kehilangan kepercayaan dari rakyat apabila segala sesuatu yang di bahas di DPRD selalu disembunyikan.

Dalam era demokrasi sekarang ini akuntabilitas dan transparansi sangat di butuhkan dalam pelaksanaan pemerintahan tidak terkecuali di daerah, akuntabilitas dan keterbukaan dituntut agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana pemerintahan, khususnya di DPRD. Pelaksanaan akuntabilitas dan keterbukaan akan membangun sebuah saling kepercayaan antara pemerintah, DPRD dan masyarakat sehingga apa yang di amanatkan dalam undang-undang akan terwujud menjadi pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik.

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali.

Dalam melaksanakan amanah undang-undang terkait masalah kebijakan tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan berbagai tantangan yang harus dilewati sehingga implementasi kebijakan itu bisa benar-benar sesuai dengan keinginan semua pihak baik itu anggota Badan Legislasi pada khususnya maupun masyarakat kabupaten Morowali pada umumnya. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terkait pelaksanaan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali.

a. Luas Wilayah

Hambatan pertama yang dihadapi Anggota DPRD Kabupaten Morowali khususnya Badan Legislasi adalah persoalan luas wilayah. Seperti yang dipahami bersama bahwa daerah wilayah Kabupaten Morowali begitu luas, bahkan jarak tempuh dari kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain memakan waktu berjam-jam untuk sampai, bahkan jika ada urusan pemerintahan ke Ibu Kota Kabupaten begitu jauh. Sehingga efektivitas mengidentifikasi masalah kemudian merumuskannya kedalam bentuk kebijakan di setiap wilayah kecamatan memakan waktu yang cukup lama.

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali mestinya perlu memikirkan tentang efektifitas waktu yang di miliki baik itu Anggota DPRD maupun staff yang bekerja di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Morowali agar segera menyediakan fasilitas tempat tinggal seperti Perumahan, sehingga mereka yang bertugas sebagai abdi masyarakat dan abdi negara dapat fokusdalam melaksanakan tugasnya, tidak terbebani dengan persoalan jarak dari tempat mereka bekerja.

b. Kurang Kreativitas dan inovasi

Faktor yang kedua adalah Kurang kreativitas dan Inovatifnya anggota Badan Legislasi yang ada di Kabupaten Morowali, karena kreativitas merupakan penyatuan pengetahuan dari berbagai bidang pengalaman yang berlainan untuk menghasilkan ide baru yang lebih baik. Sedangkan inovatif adalah pengenalan cara baru yang lebih baik dalam mengerjakan berbagai hal di tempat kerja. Angggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali lebih banyak menghabiskan waktunya di luar jam kantor dengan anggota lainnya dan tidak jelas apa yang mereka bicarakan.

Salah satu penentu utama inovasi adalah tantangan dalam lingkungan kerja. Karena lingkungan kerja inovatif memberi tekanan kuat pada kualitas pelayanan dan dukungan pimpinan untuk inovasi sangat menentukan apabila seluruh anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali ingin mengembangkan dan mengimplementasikan ide mengenai cara baru yang lebih baik dalam mengerjakan berbagai hal termasuk dalam pembuatan legislasi. Dengan adanya inovasi yang dimiliki oleh anggota Badan Legislasi secara alami akan muncul kebijakan inisiatif yang bersumber dari badan legislasi itu sendiri tanpa harus menunggu apa yang di sorongkan oleh eksekutif.

KESIMPULAN

Proses implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali belum begitu maksimal hal itu dapat dilihat dari tiga indikator yang menjadi pengukuran dalam penelitian ini seperti: *pertama, Komunikasi* komunikasi yang diajalkan hanya sebatas di tataran anggota Badan Legislasi saja tanpa melibatkan *stakeholders* yang ada di kabupaten Morowali. *Kedua, Sumber daya* yang dimiliki anggota DPRD Kanbupaten Morowali belum memadai. *Ketiga, disposisi* adalah lemahnya

kesadaran anggota Badan Legislasi dalam menjalankan tanggung jawab yang telah di amanahkan kepadanya. Seringnya molor persidangan membuat anggota Badan Legislasi tidak produktif didalam membahas legislasi.

1. Sedangkan faktor yang mempengaruhi anggota badan legislasi dalam melaksanakan tugas adalah *Pertama, Luas Wilayah*. Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Morowali sangat mempengaruhi kinerja anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Morowali karena kebanyakan anggota Baleg berdomisili di kecamatan yang jaraknya jauh dari tempat mereka bekerja sebagai wakil rakyat. *kedua kurangnya kreativitas dan inovasi* yang di miliki sehingga kebijakan yang berasal dari inisiatif Badan Legislasi masih begitu kurang.

DAFTAR RUJUKAN

- Sugiyono., 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Himpunan Produk Hukum DPRD Kabupaten Morowali Periode 1999 – 2004
- Himpunan Produk Hukum DPRD Kabupaten Morowali Periode 2004 - 2009
- Himpunan Produk Hukum DPRD Kabupaten Morowali Periode 2009 – 2011